

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

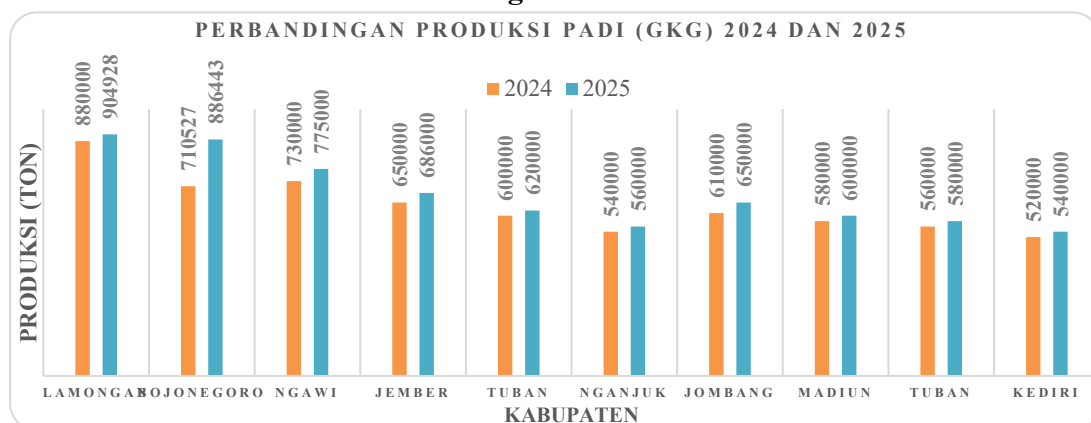
Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki peran penting sebagai penyedia pangan, sumber mata pencaharian masyarakat, penyerap tenaga kerja, serta penggerak perekonomian daerah. Di negara berkembang seperti Indonesia, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penghasil bahan pangan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Menurut Mosher (2012), pembangunan pertanian merupakan proses transformasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Secara yuridis, perlindungan terhadap sektor ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana pertanian guna mencegah risiko kegagalan panen dan kerugian petani Kementerian Pertanian (2013). Namun, transformasi sosiologis di pedesaan saat ini menunjukkan adanya tantangan struktural berupa krisis tenaga kerja agrikultur. Fenomena dominasi petani usia lanjut dan minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian mengakibatkan kelangkaan tenaga kerja manual yang memicu lonjakan biaya produksi pada setiap musim tanam Handayani (2018).

Sebagai upaya strategis untuk menjawab krisis tenaga kerja tersebut, pemerintah mengintervensi melalui kebijakan mekanisasi pertanian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pemerintah pusat dan daerah diamanatkan untuk memfasilitasi teknologi dan mekanisasi melalui Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Mekanisasi ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengolahan lahan, menekan kehilangan hasil panen (*losses*), dan secara signifikan meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani Pitriani et al., (2021) Nurdin et al., (2021).

Beberapa data statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki kontribusi besar terhadap produksi pangan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 1,84 juta hektar dengan total produksi sekitar 10,53 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 13,60% dibandingkan tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam penyediaan pangan nasional.

GAMBAR 1. 1 Perbandingan Produksi Padi Jawa Timur



Sumber: Bojonegoro, InfoPublik, Oleh MC KAB BOJONEGORO.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar dalam produksi padi di Jawa Timur. Data menunjukkan bahwa produksi padi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 mencapai sekitar 886.443 ton, meningkat dari 710.527 ton pada tahun 2024. Dengan capaian tersebut, Bojonegoro menempati peringkat kedua sebagai daerah dengan produksi padi terbesar di Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Besarnya produksi pertanian di Kabupaten Bojonegoro juga didukung oleh luasnya lahan pertanian serta tingginya tingkat produktivitas petani. Produktivitas padi di beberapa wilayah bahkan dapat mencapai sekitar 6,5–7 ton per hektare, yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani di wilayah ini memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Melihat besarnya potensi sektor pertanian tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai program pembangunan pertanian, salah satunya melalui program mekanisasi pertanian seperti bantuan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN). Program ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja petani, mempercepat proses pengolahan lahan, serta meningkatkan hasil produksi pertanian.

Pada tahun 2025–2026, Kabupaten Bojonegoro menerima berbagai jenis ALSINTAN seperti hand tractor, traktor roda dua dan roda empat, cultivator, hingga drone pertanian. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung mekanisasi pertanian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di

berbagai kecamatan. Berdasarkan data penerima bantuan Alsintan, pada tahun penyaluran bantuan terdapat 16 unit hand traktor yang disalurkan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Sugihwaras. Di Kecamatan Sugihwaras, bantuan hand traktor diberikan kepada Poktan Barokah Desa Siwalan, Gapoktan Sumber Rejeki Desa Sumberrejo, Gapoktan Sido Makmur II Desa Werdoyo, dan Poktan Margo Utomo III Desa Bareng. Penyaluran bantuan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro).

Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong modernisasi pertanian tidak hanya sebatas penjabaran kebijakan di tingkat pusat, melainkan telah diintegrasikan secara terstruktur ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Dalam kerangka kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan "Pengembangan Potensi Ekonomi Berkelanjutan" sebagai salah satu fokus utama yang ditempuh melalui skema industrialisasi dan hilirisasi produk lokal, khususnya di sektor pertanian. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah daerah memformulasikan serangkaian program prioritas guna memenuhi kebutuhan dasar petani, di mana salah satu poin krusialnya adalah implementasi Program Bantuan Pupuk dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).

Kedudukan tata kelola Alsintan di dalam RKPD 2025 menegaskan bahwa instrumen mekanisasi ini dirancang untuk menjadi penopang utama agar hasil

produksi masyarakat dapat terhubung dengan rantai pasok nasional. Kebijakan strategis ini sejalan dengan temuan penelitian Syahputra and Wibowo (2024) yang mengkaji sinkronisasi perencanaan daerah, di mana ditegaskan bahwa penjabaran program bantuan sarana prasarana pertanian ke dalam dokumen RKPD merupakan langkah katalisator yang esensial. Ketersediaan Alsintan yang diamanatkan oleh pemerintah daerah tidak hanya berfungsi menekan biaya tenaga kerja di tingkat desa, tetapi juga memfasilitasi transformasi kelembagaan lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengawalan dan evaluasi terhadap tata kelola bantuan Alsintan di tingkat akar rumput sebagaimana yang dilaksanakan pada kelompok tani di Desa Siwalan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa mandat strategis dari RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 tersebut benar-benar terealisasi secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel di lapangan.

Meskipun distribusi fisik Alsintan telah dilakukan, keberhasilan sebuah program kebijakan publik tidak hanya dinilai dari tersedianya barang di lapangan. Perspektif administrasi publik menekankan bahwa tantangan terbesar dari program bantuan pemerintah justru terletak pada dimensi tata kelola kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas Anugrah et al., (2020). Berbagai kajian terdahulu menemukan bahwa penyaluran Alsintan sering kali gagal memberikan dampak jangka panjang akibat lemahnya sistem manajemen kelompok tani Syahyuti (2019). Ketidadaan alokasi dana operasional dan pemeliharaan dari pemerintah daerah pasca-penyerahan menuntut kelompok tani untuk mandiri secara finansial. Jika kelembagaan pengelola alat tidak bertransformasi ke arah profesional, bantuan

negara tersebut berisiko cepat rusak, tidak terawat, atau bahkan dimonopoli oleh segelintir elit desa Saptana (2020).

Persoalan pertama yang sering kali muncul ke permukaan adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses penentuan kelompok tani sasaran. Ketepatan sasaran sangat bergantung pada sejauh mana objektivitas verifikasi proposal permohonan dijalankan oleh dinas terkait. Isu mengenai ada atau tidaknya unsur nepotisme, intervensi, maupun kedekatan politis dalam penentuan kelompok penerima bantuan menjadi ujian penting bagi integritas tata kelola pemerintahan daerah, agar bantuan tidak hanya berputar pada kelompok yang memiliki akses kekuasaan saja Mardikanto (2014).

Persoalan kedua berkaitan dengan dimensi koordinasi dan tata hubungan kerja antar institusi. Pelaksanaan program ini menuntut adanya sinergitas yang kuat antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai representasi pemerintah daerah, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) selaku birokrat garda depan (*street-level bureaucrats*), Pemerintah Desa Siwalan sebagai otoritas wilayah bawah, hingga Pengurus Gapoktan dan Poktan selaku penerima manfaat. Adanya ego sektoral, hambatan komunikasi, atau ketidakjelasan pembagian wewenang di antara aktor-aktor tersebut berpotensi memicu tumpang tindih fungsi yang menghambat efektivitas program di lapangan.

Selain itu, Menurut Anugrah et al. (2023) kepatuhan implementasi (*implementation fidelity*) terhadap regulasi merupakan aspek legal-formal yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai Pedoman Teknis

(Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk mengawal jalannya bantuan. Kendati demikian, sering kali ditemukan adanya diskrepansi atau celah (gap) antara apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan dengan apa yang secara konsisten diimplementasikan oleh aparat di tingkat lapangan. Ketidakkonsistenan penegakan juknis ini dapat memicu kekaburan sistem pertanggungjawaban administratif dan pengawasan atas aset negara yang telah dihibahkan.

Pada peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian secara eksplisit mengarahkan agar pengelolaan Alsintan dilakukan melalui kelembagaan yang mandiri dan tertib administrasi Kementerian Pertanian (2023). Oleh karena itu, kesiapan pengurus kelompok tani dalam menyusun jadwal giliran pakai yang adil, merumuskan tarif sewa untuk kas pemeliharaan secara musyawarah, hingga merekrut operator yang kompeten menjadi kunci utama keberlanjutan program mekanisasi ini Irawan (2022), Kurniawan (2022). Selain itu, pengawasan atau *monitoring* dari birokrasi garda depan (*street-level bureaucracy*) seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga sangat menentukan tingkat kepatuhan petani terhadap regulasi larangan jual-beli atau penguasaan sepihak atas aset hibah tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi Program Bantuan ALSINTAN bagi Kelompok Tani di Kecamatan Sugihwaras. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan program, kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas usahatani padi

sawah dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi pertanian yang memiliki fungsi sebagai pengembangan pertanian. Hal ini yang membuat petani menggunakan mesin pertanian berupa traktor, mesin perontok, pemanen dan penggiling padi untuk membantu kegiatan budidaya pertaniannya Haifan (2017). ALSINTAN bermanfaat juga untuk mengurangi biaya usahatani dan mengurangi biaya tenaga kerja dan pascapanen, serta mutu hasil panen, akan tetapi supaya lebih cepat berkembang ALSINTAN harus memiliki kelayakan secara teknis, sosial dan ekonomis bagi para petani Sugiarto (2010).

. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program bantuan alat dan mesin tani (ALSINTAN) bagi kelompok tani di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program. Dengan demikian, kajian mengenai Evaluasi Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) bagi Kelompok Tani menjadi relevan dan penting, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program bantuan ALSINTAN serta berbagai faktor yang mempengaruhi pemanfaatannya oleh kelompok tani di tingkat desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Formulasi permasalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian karena menjadi dasar arah berpikir serta fokus utama yang akan dianalisis dalam penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2019), perumusan

masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun secara sistematis dan logis untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Rumusan masalah yang baik harus bersifat jelas, spesifik, serta dapat dikaji melalui pendekatan ilmiah sehingga mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Evaluasi Bantuan Program Alat dan Mesin Pertanian bagi kelompok tani di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?”

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) bagi kelompok tani di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam aspek praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana teori pelaksanaan atau evaluasi program dapat diterapkan dalam menilai pelaksanaan Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) bagi kelompok tani.

2) Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program bantuan ALSINTAN yang dilaksanakan pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa mengenai program bantuan pemerintah di bidang pertanian maupun program pemberdayaan kelompok tani.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung kegiatan pertanian.

2) Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam menilai pelaksanaan program bantuan ALSINTAN serta menjadi acuan dalam pengembangan program pertanian di masa mendatang.

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kelompok tani dan masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian secara optimal guna meningkatkan produktivitas pertanian.

4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pelaksanaan atau evaluasi program bantuan

pemerintah di bidang pertanian, khususnya terkait dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) dalam meningkatkan kegiatan usaha tani.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam memudahkan peniliti untuk mengkaji dan menelaah penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian bagi Kelompok Tani di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro” dirasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan gambaran skripsi dalam setiap bab-bab bahasan yang memiliki tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami bacaan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang konsep dasar penelitian yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab satu ini nantinya menjadi gambaran yang ditujukan kepada pembaca untuk mengetahui pembahasan yang ditulis dalam penelitian Evaluasi Program Bantun Alat dan Mesin Pertanian bagi Kelompok Tani di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

BAB II, merupakan bab yang akan menjelaskan kajian pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang digunakan sebagai pendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian ini yakni Evaluasi Program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian bagi Kelompok Tani di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro selain itu terdapat penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam penulisan penelitian.

BAB III, merupakan bab yang akan membahas mengenai metode penelitian dimana didalamnya memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang

digunakan, jenis dan tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

BAB IV, dalam bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data terkait topik penelitian secara mendetail bagaimana kolaborasi ini akan dilakukan dengan menggunakan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB V, merupakan bagian kesimpulan yang menjadi akhir dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian serta saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada setiap bab sebelumnya yang ditarik secara ringkas.